

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN CIAMIS

Devi Damayanti¹, Neti Sunarti², Otong Husni Taufiq³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : dvdamay3112@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penjagaan awal, diketahui bahwa efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran belum efektif. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh UPT Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh UPT Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis?; 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh UPT Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Adapun teknik pengumpulan datanya meliputi studi kepustakaan, studi lapangan (observasi wawancara) serta studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa : 1) Efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal. 2) Hambatan-hambatan dalam mewujudkan efektivitas pelayanan pemadaman diantaranya : petugas yang belum mengikuti diklat atau pelatihan, ada kekurangan dalam sumber daya manusia, terbatasnya alat perlindungan diri petugas, dan pemahaman masyarakat yang rendah mengenai pelayanan damkar, belum dilakukan secara optimal karena belum terbentuknya pos pemadam kebakaran disetiap kecamatan atau minimal 9 kecamatan se-Kabupaten Ciamis, petugas kurang aktif dalam memberkan informasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat yang rendah mengenai pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis. 3) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu pembentukan Pos WMK Damkar, Penyediaan Alat Perlindungan Diri petugas, Menambah jumlah petugas pemadam, Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan, Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran, Membentuk masyarakat binaan pemadam kebakaran, penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan diskusi publik terhadap dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Pendidikan dan Pelatihan Petugas Inspeksi.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pelayanan, Pemadam, Kebakaran, Masyarakat*

ABSTRACT

Based on preliminary stewardship results, it is known that the effectiveness of fire fighting services is not yet effective. Starting from these problems, the formulation of the problem in this study can be formulated as follows: 1) How is the effectiveness of fire fighting services by the UPT Fire Department in Ciamis Regency ?; 2) What are the obstacles in the Effectiveness of Fire Fighting Services by the Fire Service Unit in Ciamis Regency ?; 3) How are the efforts to overcome obstacles in the Effectiveness of Fire Fighting Services by the Fire Service Unit in Ciamis Regency? The research method used in this research is to use a qualitative approach. The sampling technique used was purposive sampling. The data collection techniques include literature study, field study (interview observation) and documentation study. Data analysis techniques, namely from interviews, observations that have been written in field notes, personal documents, official documents, pictures, photos and so on. Based on the research results, it was found that: 1) The effectiveness of fire fighting services by the Technical Implementation Unit of the Fire Service in Ciamis Regency has not been implemented optimally. 2) Obstacles in realizing the effectiveness of blackout services include: officers who have not attended training or training, there is a lack of human resources, limited personal protective equipment for officers, and low understanding of the community regarding damkar services, which have not been carried out optimally because the post has not been established. firefighters in every sub-district or at least 9 sub-districts in Ciamis Regency, officers are less active in providing information or socializing to the community so that the public's understanding is low about the services of the Ciamis District Fire Brigade Regional Technical Implementation Unit. 3) Efforts to overcome the obstacles faced, namely the establishment of the WMK Damkar Post, Provision of Personal Protection Equipment for officers, Increasing the number of firefighters, Education and training of rescue workers, Training / simulations and outreach for fire volunteer communities, Forming fire fighting assisted communities, provision of competent experts in the preparation of fire management operational plan documents and public discussions of the Fire Protection System Master Plan, Inspection Officer Education and Training.

Keywords: *Effectiveness, Service, Fire, Fire, Society*

PENDAHULUAN

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus

dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Standar Pelayanan merupakan salah satu faktor penilaian penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat. Penambahan Unit Mobil Pemadam kebakaran untuk 27 Kecamatan di Kabupaten Ciamis, dan tersedianya petugas lapangan yang memiliki kemampuan dalam melakukan penyelamatan kebakaran dengan tanggap akan sangat menunjang terlaksananya Efektivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran di Wilayah Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan yang berdampak pada mutu pelayanan dan akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Berdasarkan hasil peninjauan di Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis, peneliti menemukan permasalahan bahwa pelayanan pemadaman kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara efektif, permasalahan tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut : 1) Kurangnya fasilitas mobil pemadam kebakaran yang dimiliki UPTD Pemadam Kebakaran. Hal ini dibuktikan dengan jumlah armada 9 (Sembilan) Unit belum mampu mengefektifkan pelayanan pemadaman kebakaran di wilayah Kabupaten Ciamis. 2) Kurangnya Petugas Lapangan di UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis terbukti dengan data Petugas Lapangan yang berjumlah 20 orang untuk 9 Mobil Kebakaran yang ada, sementara idealnya 1 (satu) mobil ada 6 (enam) orang petugas. 3) Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan dengan belum efektifnya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit yaitu waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran dimulai saat setelah petugas menerima laporan informasi kejadian kebakaran sampai ke tempat/lokasi terjadinya kebakaran, hal ini dikarenakan jarak wilayah Ciamis yang berjauhan antar Kecamatan menyebabkan kurang efektifnya pelayanan dari UPTD

Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis

Kurang efektifnya pelayanan pemadam kebakaran di Kabupaten Ciamis, diduga disebabkan oleh kurangnya pos WMK, Kurangnya SDM Petugas pemadam. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya indikator-indikator sebagai berikut : 1) Kurangnya fasilitas mobil pemadam kebakaran yang dimiliki UPTD Pemadam Kebakaran. Hal ini dibuktikan dengan jumlah armada 9 (Sembilan) Unit belum mampu mengefektifkan pelayanan pemadaman kebakaran di wilayah Kabupaten Ciamis. 2) Kurangnya Petugas Lapangan di UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis terbukti dengan data Petugas Lapangan yang berjumlah 20 orang untuk 9 Mobil Kebakaran yang ada, sementara idealnya 1 (satu) mobil ada 6 (enam) orang petugas. 3) Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan dengan belum efektifnya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit yaitu waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran dimulai saat setelah petugas menerima laporan informasi kejadian kebakaran sampai ke tempat/lokasi terjadinya kebakaran, hal ini dikarenakan jarak wilayah Ciamis yang berjauhan antar Kecamatan menyebabkan kurang efektifnya pelayanan dari UPTD

Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul :“Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis?; 2) Bagaimana hambatan hambatan dalam Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis?; 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

Pada dasarnya efektivitas mengarah pada tujuan yang telah direncanakan, dalam pelaksanaannya efektivitas sangat berpengaruh pada pencapaian atau keberhasilan pelayanan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis

Menurut Subkhi dan Jauhar dalam (Garis, R. R., Sihab, A. A., & Tiarani, W. A. 2020). mengemukakan bahwa

:Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan.

Efektivitas merupakan tujuan yang direncanakan seperti yang di kemukakan oleh Harbani Pasolong (2007:4) : Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Sudirman (2012:31) berpendapat bahwa Efektivitas adalah : Pemanfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya

Adapun kriteria efektivitas menurut pendapat Makmur (2011:7) yang menyatakan sebagai berikut :

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

Berdasarkan beberapa pendapat diatas efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai yang diinginkan. Pelayanan masyarakat bisa dikatakan baik bila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, aktu cepat dan hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya.

Pelayanan adalah sebagai wujud yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kurniawan (2005:6), “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan masyarakat, yang memiliki kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan” . Sedangkan menurut Harbani Pasolong (2007:128) “Pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam memberikan layanan oleh pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada dasarnya efektivitas pelayanan mengarah pada tujuan yang telah direncanakan, dalam pelaksanaannya efektivitas sangat berpengaruh pada pencapaian atau keberhasilan pelayanan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis.

Pemadam kebakaran merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Menurut Suprpto (2007:10) mengemukakan bahwa : Penanganan kebakaran di level kota dan kabupaten ditangani oleh institusi pemadam kebakaran (IPK). Lingkup kewenangannya adalah upaya pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam tindakan penanggulangan kebakaran. Perkembangan menuntut agar institusi pemadam kebakaran melakukan pula tugas-tugas penyelamatan (*rescue*) terhadap bencana umum perkotaan lainnya, serta penanganan benda berbahaya. Kelembagaan institusi pemadam kebakaran ada di tingkat kota madya dan kabupaten. Meski status

institusi pemadam kebakaran di tiap daerah bisa bervariasi namun tupoksi dan misinya sama. Mengikuti perkembangan di dunia maka selayaknya undang-undang yang memayungi keberadaan institusi pemadam kebakaran dan fungsinya perlu disusun sebagaimana di Jepang yang disebut sebagai *Fire Safety Law*. Tuntutan misi institusi pemadam kebakaran kedepan mencakup upaya pemadaman, pencegahan, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan benda berbahaya. Implikasinya adalah reorientasi keberadaan IPK, peningkatan peran dan kinerja, pembinaan SDM, pembinaan sarana dan prasarana serta peraturan pendukung.

Selanjutnya Menurut Dalton Malik (2007:13) adalah : Untuk penanganan kebakaran di kab/kota tanggung jawab Pemda setempat. Institusi pemadam kebakaran secara administratif dibina oleh Depdagri. Institusi pemadam kebakaran secara teknis dibina oleh Departemen PU. Status dan layanan IPK perlu ditingkatkan dengan berbasis pada masyarakat dan resiko bencana yang ada. Setelah resiko bencana diketahui dan jenis layanan disepakati (Perda organisasi), maka dapat diperkirakan kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, peran masyarakat, serta SOP.”

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penanganan kebakaran di kab/kota.

Depdagri menjadi pembina administratif Institusi pemadam kebakaran. Status dan layanan IPK perlu ditingkatkan dengan berbasis pada masyarakat dan resiko bencana yang ada. Setelah resiko bencana diketahui dan jenis layanan disepakati (Perda organisasi), maka dapat diperkirakan kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, peran masyarakat, serta standar operasional pelayanan.

Fasilitas pemadam kebakaran merupakan faktor yang paling penting dalam sistem pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran. Fasilitas pemadam yang memadai akan mempengaruhi kecepatan pemadaman. Semakin lengkap dan banyak fasilitas pemadam, jangka waktu pemadaman kebakaran dapat dipersingkat. Hal ini berarti mengurangi kemungkinan jumlah kerugian harta dan korban.

Menurut Freed Luthans (1995;46) mengatakan bahwa :

“Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala masalah yang ditujukan orang lain untuk menyelesaikan masalah.”

Menurut Permendagri No.122 Tahun 2018

“Pemadam kebakaran dan penyelamatan yaitu perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran” sedangkan “kebakaran merupakan suatu

peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.”

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan diri

“Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, tingkat waktu tanggap (*Respose Time Rate*) 15 menit adalah waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran dimulai saat setelah petugas menerima informasi kejadian kebakaran sampai ke tempat/lokasi terjadinya kebakaran.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pemadaman kebakaran merupakan proses pemenuhan kebutuhan pelayanan orang lain atau masyarakat yang menyangkut kebutuhan pelayanan jasa kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yang dimaksudkan guna meneliti sejumlah data dan fakta yang diperoleh dari objek penelitian. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 6 bulan.

Peneliti menggunakan teknik sampel purposive (*Purposive Sampling*), penunjukan sampel secara sengaja (purposive) ini dilakukan karena hanya beberapa pihak yang terlibat dengan UPTD Pemadam Kebakaran yang menjadi fokus penelitian sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis

Untuk tercapainya efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran harus ada integritas dan kerjasama dari semua elemen sehingga pelayanan pemerintah tersebut dapat berjalan dengan lancar, seperti dalam hal ini adalah keefektifan pelayanan pemadaman kebakaran. Pelayanan pemadaman kebakaran yang efektif bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, melaksanakan pemadaman kebakaran, melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Keefektifan Pelayanan Pemadaman Kebakaran ini sangat penting dan sangat diperlukan oleh pemerintah yaitu untuk meminimalisir adanya korban jiwa saat terjadinya kebakaran atau kerugian

materiil yang besar. Sehingga dengan hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri membuat berbagai aturan untuk Dinas atau UPT Pemadam Kebakaran untuk menciptakan rasa aman pada Masyarakat.

Berdasarkan rekapitulasi hasil wawancara mengenai efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis dapat diketahui bahwa secara umum telah dilaksanakan dengan optimal. hal ini ditunjukkan dengan sebagian informan yang menyatakan telah dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan hasil observasi bahwa efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis pada umumnya dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat indikator yang pelaksanaannya mengalami hambatan seperti sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya anggaran dalam pelatihan petugas dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kurangnya sosialisasi pemadam kebakaran kepada masyarakat.

Hambatan-Hambatan Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dari tiap-tiap indikator-indikator mengenai hambatan dalam Hambatan-Hambatan Efektivitas Pelayanan Pemadaman

Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

1. Pelayanan dilapangan masih kurang mengingat jarak tempuh dari UPTD Pemadam Kebakaran lumayan jauh dari lokasi kejadian
2. Masih banyaknya petugas yang belum mengikuti diklat atau pelatihan
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada petugas pemadam kebakaran
4. Terbatasnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran
5. Terbatasnya anggaran pemeliharaan rutin mobil pemadam kebakaran
6. Kurangnya alat komunikasi
7. Kurangnya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (*Pusdalops*) Pemadam Kebakaran
8. Belum terbentuknya pos WMK pemadam kebakaran
9. Kurangnya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran
10. Terbatasnya alat perlindungan diri petugas
11. Belum tersedianya mobil penyelamatan
12. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan bahaya kebakaran
13. Belum terbentuknya masyarakat binaan pemadam kebakaran

Upaya-Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Efektivitas

Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terdapat upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pemadam kebakaran, guna meningkatkan efektivitas pelayanan sehingga *respon time rate* 15 menit bisa tercapai dengan maksimal
2. Meningkatkan kapasitas petugas yang belum mengikuti diklat atau pelatihan
3. Meningkatkan sumber daya manusia pada petugas pemadam kebakaran
4. mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran
5. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin mobil pemadam kebakaran
6. Menambah alat komunikasi
7. Menambah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (*Pusdalops*) Pemadam Kebakaran
8. Melengkapi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran

9. Menambah alat perlindungan diri petugas
 10. Menyediakan mobil penyelamatan (*rescue*)
 11. Menambah tingkat sosialisasi kepada masyarakat, agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan bahaya kebakaran
- Membentuk terbentuknya masyarakat binaan pemadam kebakaran

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan masih banyak petugas yang belum mengikuti diklat atau pelatihan, ada kekurangan dalam sumber daya manusia, terbatasnya alat perlindungan diri petugas, dan pemahaman masyarakat yang rendah mengenai pelayanan damkar. Begitu pula dengan observasi yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis belum dilakukan secara optimal karena belum terbentuknya pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan atau minimal 9 kecamatan se-Kabupaten Ciamis,

petugas kurang aktif dalam memberkan informasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat yang rendah mengenai pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis.

2. Hambatan utama adalah kurangnya belum terbentuknya pos WMK Damkar,, terbatasnya alat perlindungan diri petugas, kurangnya pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan bahaya kebakaran, belum terbentuknya masyarakat binaan pemadam kebakaran, belum memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan, kurangnya pendidikan dan pelatihan petugas inspeksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Anggara, Sahya, (2012). *Ilmu administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Danim, Sudarwan. (2004). *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Karsadi. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, (2000). *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sianipar, JPS. (1998). *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sutarto. (2002). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Garis, R. R., Sihab, A. A., & Tiarani, W. A. (2020). *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Musamus Journal of Public Administration, 3(1), 1-9.
- Suwarlan, Erlan. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan Perizinan*. Bandung: LEKKAS.
- Budiani, Ni Wayan. Jurnal.2000. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi Dan Sosial. Vol. 2 No.1, 2000.
- Mutholib, Abdul. Jurnal.2016. *Peranan UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komuniiasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan di Masyarakat Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Moderat Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh (Vol 2 No 1 Tahun 2016),
- Ridwan. Jurnal.2019. *Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Preteksi Kebakaran dalam Upaya Pencegahan Kebakaran di Kabupaten Purwakarta*”. Jurnal Dinamika Administrasi Negara Universitas Galuh (Vol.6 No.4 Tahun 2019)